



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA DI
PROVINSI SUMATERA BARAT”**

SKRIPSI



**WIDIYA ADE SISKA
1210536032**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

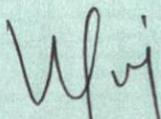
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **WIDIYA ADE SISKA**
No. BP : 1210536032
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul : **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di
Provinsi Sumatra Barat.**

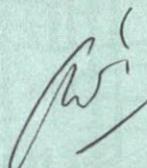
Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 22 Januari 2015 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Ketua Program Studi Akuntansi
Reguler Mandiri



Dra. Warnida, MM, Ak. CA
NIP. 19651118 1992032003

Padang, Januari 2015
Pembimbing Skripsi



Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA, CA
NIP. 19650807031991 2 002



No Alumni Universitas

WIDIYA ADE SISKA

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Bukittinggi 10 Feb 1989 b). Nama Orang Tua: Asniar dan Chairul c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No.Bp : 1210536032 f). Tanggal Lulus : 22 Januari 2015 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK: 3,18 i). Lama Studi : 2 Tahun 5 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jalan Kampung Koto Kel. Bukit Apit Puhun. Bukittinggi

Analysis Effect of The Local Original Revenue (PAD) Financial Performance Against the City of West Sumatra Province

Thesis by : **WIDIYA ADE SISKA**

Thesis Advisor : **Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA, CA**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local original revenue (PAD), which consists of local taxes, levies, profit enterprises, and other legal PAD on the government's financial performance of cities in West Sumatra province. This study used data from budget and budget realization reports of city government's in West Sumatera Province for the year 2008- 2012, the data used published by Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. The analysis method used was quantitative analysis with multiple regression models.

The results of this study indicate that the original income have an influence simultaneously on financial performance. However, local taxes partially have and influence on the financial performance, while the levy, profit enterprises, and other revenues legal PAD do not have a dominant influence on the financial performance of the city government's in the province of West Sumatra.

Keywords: *Local original revenue (PAD), local taxes, levies, profit enterprises, and other legal PAD, financial performance.*

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Skripsi : WIDIYA ADE SISKA
Pembimbing: Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CSRS, CSRA

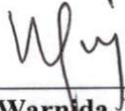
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, Laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data laporan APBD dan laporan realisasi APBD pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 - 2012 yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan model regresi berganda.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara keseluruhan/simultan terhadap kinerja keuangan. Namun secara parsial hanya pajak daerah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan, sedangkan retribusi, Laba BUMD, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, Laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah, kinerja keuangan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Januari 2015, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Drs. Iswandi, MM, Akt. CA	Dra. Warnida, MM, Ak. CA

Alumni telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Barat”**Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015
Yang memberi pernyataan,



WIDIYA ADE SISKA
1210536032

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Analisis Pengaruh Pedapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Sumatra Barat**” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala , namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak yang penulis terima dari berbagai pihak, dan berkat Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat dilewati. Begitu pun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Bantuan, bimbingan, dan dukungan dari orang-orang terdekat selalu ada untuk penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa selalu menyemangati dan mendoakan , hingga saya mampu meraih gelar sarjana saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Bapak Firdaus SE, M.Si, Akselaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Dra. Warnida, MM, Ak: CA selaku Kepala Program Studi Akuntansi Reguler Mandiri, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Asniati, SE, MBA, Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan nasehat di dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu, dukungan moril yang telah ibu berikan di luar skripsi pun telah banyak membantu penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikandari awal penulis kuliah hingga akhir masa studi ini. Insya Allah, ilmu tersebut bermanfaat dan akan penulis gunakan sebaik mungkin
7. Teman- teman Akuntansi intake D3 yang selalu memberikan masukan dan dukungannya untuk saya baik selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 26 Januari 2015

Penulis,

Widiya Ade Siska
1210536032

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI i

ABSTRAK ii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I.PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Rumusan Masalah..... 4

 1.3 Batasan Masalah 5

 1.4 Tujuan Penelitian 5

 1.5 Manfaat Penelitian 6

 1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

 2.1 Pengertian Otonomi Daerah..... 8

 2.2 Tujuan Otonomi Daerah 8

 2.3 Penerimaan Daerah 11

 2.4 Pendapatan Asli Daerah..... 13

 2.4.1 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah..... 13

 2.4.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah..... 15

2.5 Teori Anggaran	15
2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	16
2.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.8 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.....	17
2.9 Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	18
2.10 Metode Pendekatan Pengukuran Kinerja.....	20
2.10.1 Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah.....	20
2.10.2 Analisis Anggaran	22
2.10.3 Balance Scorecard Method.....	22
2.10.4 Pengukuran Value For Money	23
2.11 Penelitian Terdahulu	23
2.12 Kerangka Pemikiran	26
2.13 Hipotesis	26

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran	30
3.6 Metode Penelitian	33
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.6.2 Analisis Regresi Berganda.....	35
3.7 Pengujian Hipotesis	36

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Provinsi Sumatera Barat	37
4.1.1 Profil Sumatera Barat.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	38
4.2 Statistik Deskriptive	39
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.4 Analisis Regresi	43
4.5 Uji Hipotesis	46
4.5.1 Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan	46
4.5.2 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.....	47
4.5.3 Pengaruh Retribusi Terhadap Kinerja Keuangan.....	48
4.5.4 Pengaruh Laba BUMD Terhadap Kinerja Keuangan.....	49
4.5.5 Pengaruh Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan.....	50

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA.....	54
---------------------	----

LAMPIRAN	55
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pajak	15
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Kriteria Durbin – Watson (Dw).....	35
Tabel 4.1 Analisis Deskriptive	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Multi Kolineritas	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	43
Tabel 4.4 Nilai Koefisien Regresi Untuk Kinerja Keuangan Dengan Komponen PAD.....	43
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Hipotesa Uji (R^2)	45
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	46
Tabel 4.7 Nilai T-Hitung Untuk Pajak Daerah	47
Tabel 4.8 Nilai T-Hitung Untuk Pajak Retribusi	48
Tabel 4.9 Nilai T-Hitung Untuk Laba BUMD	49
Tabel 4.10 Nilai T-Hitung Untuk Pendapatan Lain – Lain	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1. Normalitas P-P Plot	41
Gambar 4.2. Scatterplot	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Regresion Antar PAD dan Kinerja	55
Lampiran 2. Data PAD dan Penerimaan Daerah Kota Sumatera Barat	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kemakmuran rakyat banyak. Pelaksanaan Pembangunan nasional ini harus merata diseluruh daerah, untuk itu pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah ini, setiap daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi baru. Sejalan dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dimana otonomi daerah ini didukung oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Daerah Otonomi, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan adanya wewenang tersebut diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.

Selain itu ditetapkan juga terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Menurut Undang – undang No.28 Tahun 2009 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut. Otonomi daerah diyakini membantu kemandirian daerah, maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran dan belanja daerah (APBD) adalah meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan pajak retribusi.

Dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah. Kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya mendorong pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan memberi

perhatian khusus dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meujudkan kebutuhan masyarakat tersebut maka Pemerintah dituntut harus bisa meningkatkan kinerja dan mengelola keuangannya. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola kinerja keuangan maka perlu dilakukannya suatu pengukuran.

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan *good governance*. Pemerintah harus dapat melaporkan hasil program yang mereka laksanakan secara transparan agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah.

Begitu juga dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga dituntut untuk transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, untuk itu perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah rasio desentralisasi fiskal. Dimana rasio ini dapat mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah, dengan cara membandingkan komponen PAD dengan total pendapatan asli daerah.

Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat, karena itu pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan

laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya secara transparan untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, serta dapat menilai apakah ada penyelewengan atau tidak yang dilakukan oleh aparat pererintahan tersebut. Untuk itu masyarakat sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu, sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan, menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada pemerintahan daerah sehingga masyarakat juga dapat memantau kinerja pemerintah apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- b. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- c. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- d. Apakah terdapat pengaruh laba BUMD terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?

- e. Apakah terdapat pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, lebih terfokus pada PAD pemerintah di 7 kota pada Provinsi Sumatera Barat terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008 s.d 2012.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- b. Untuk menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- c. Untuk menganalisa pengaruh retribusi daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- d. Untuk menganalisa pengaruh laba BUMD terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?
- e. Untuk menganalisa pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Instansi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat.

b. Bagi peneliti, hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kajian akademik tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan Pemerintah, yang mana konsep dan teori tersebut dijadikan sebagai landasan dan acuan dalam membahas masalah penelitian. Di samping itu, bab ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran peneliti, dan pengembangan hipotesis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan metode pengukuran variabel, serta metode analisis data yang peneliti gunakan.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek yang diteliti, hasil analisis data dari objek yang diteliti, serta pembahasan mengenai interpretasi olahan data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V. Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh peneliti dari kegiatan penelitian yang dilakukannya, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta berbagai saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan teori – teori yang mendukung perumusan hipotesis di dalam penelitian. Secara garis besar, teori yang akan diuraikan meliputi teori-teori yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas serta teori-teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah variabel terikat. Di samping itu peneliti juga akan menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang terkait dengan hubungan antara variabel-variabel yang ada.

2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata “autonomy” dimana “auto” artinya sedia dan “nomy” artinya aturan atau Undang-Undang, jadi autonomy artinya hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri dimana hak tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam Kuncoro (2007) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan

pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat sedikitnya ada 4 (empat) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu:

- a. Pendidikan politik
- b. Pelatihan kepemimpinan
- c. Menciptakan stabilitas politik
- d. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.

Sementara menurut Smith dalam Kuncoro (2007) dilihat dari sisi kepentingan daerah otonomi daerah adalah mewujudkan yang disebut dengan :

- a. *Politik quality*, ini berarti bahwa melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal.
- b. *Local accountability*, ini berarti akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
- c. *Local responsiveness*, pemerintah daerah dianggap lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, maka kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2013) tujuan utama dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan tidak hanya membatasinya pada konteks hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, maka semuanya bermuara pada pengaturan mekanisme hubungan antara Negara dan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi baik pada proses pengambilan keputusan di daerah maupun di dalam pelaksanaannya. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokasi penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka konsep otonomi yang diterapkan adalah :

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah kecuali untuk bidang politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, serta bidang keuangan dan moneter. Dalam konteks ini, pemerintah daerah terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu daerah kabupaten, kota, dan provinsi.
- b. Penguatan peran sebagai representasi rakyat.
- c. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki, serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- d. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi.

- e. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah serta pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

2.3. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penertimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Sumber – sumber Penerimaan Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu;
 1. Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Bagian Laba Usaha Daerah (PDAM, Bank Daerah)
 4. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

5. Lain – lain PAD yang sah seperti Pendapatan Bunga, jasa giro, komisi dan Potongan

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi;

1. Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)
2. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat seperti pelayanan dibidang kesehatan dan Pendidikan
3. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan Daerah

C. Lain – lain Pendapatan

Lain – lain Pendapatan terdiri atas:

1. Hibah
2. Dana Darurat, yakni dana dari APBN yang diberikan kepada Daerah untuk keperluan mendesak.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Halim (2004: 125) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah "Sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Pajak

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Kendaraan Bermotor	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7. Pajak Parkir
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Air Permukaan	9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Rokok	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2.5. Teori Anggaran

Menurut Glen A. Welsch dalam bukunya berjudul Budgeting menyebutkan bahwa anggaran merupakan suatu bentuk statement daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/blue print dalam periode itu. Beberapa fungsi anggaran, yaitu : (1) Sebagai instrumen politik, artinya anggaran merupakan salah satu instrument

formal yang mewujudkan *bargaining eksekutif* dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislatif. (2) Instrumen Kebijakan Fiskal. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya. (3) Instrumen Perencanaan. Anggaran menyebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja. (4) Instrumen Pengendalian. Anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja, sehingga unit kerja tidak melakukan *overspending*, *underspending*, atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD/N merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja, dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Dibidang pengelolaan pendapatan daerah akan terus diarahkan pada peningkatan PAD.

2.7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. (Tri Suparto:2007)

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga. (Bahrul:2010)

2.8. Pengukuran Kinerja Pemerintah daerah

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan

indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Menurut Whitaker, (1995:250) mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu Simons (1995) menyatakan sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil/*output actual* dengan sasaran dan tujuan strategi.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta (Ihyaul Ulum, 2009).

2.9. Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintahan Daerah

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang

telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Nogi, 2003:108).

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- c. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Ulum, 2004:277).

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2004:121).

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Widodo dalam Detisa (2009) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah

- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah

Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.10. Metode Pendekatan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2013) Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilih sangatlah tergantung pada faktor kritical keberhasilan yang telah diidentifikasi. Beberapa ukuran keberhasilan dapat diklasifikasikan dalam beberapa perspektif. Sebagai pendekatan yang menekankan pada aspek finansial maupun nonfinansial bisa digunakan secara bersama dengan saling melengkapi. Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut:

2.10.1 Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja

pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Mardiasmo, 2013).

Adapun rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut (Bastian, dikutip dalam Batubara, 2009):

a. Rasio Kemandirian

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

b. Rasio Upaya fiskal

Bagian ini akan mengukur tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\frac{\text{Total pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total anggaran asli daerah}}$$

Semakin tinggi hasil rasionya, akan semakin terlihat bahwa upaya pemerintah daerah semakin lebih baik dan adanya perencanaan yang baik dalam mengelola pendapatan.

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan

$$\frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total penerimaan daerah}}$$

2.10.2 Analisis Anggaran

Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperolehnya berupa selisih lebih (favourable variance) atau selisih kurang (unfavourable variance). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial . Data yang digunakan untuk analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran (Mardiasmo, 2013).

2.9.3 *Balance Scorecard Method*

Pengukuran kinerja dengan baerbasis pada aspek finansial dan nonfinansial. Dimensi pengukuran mencakup 4 (empat) perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi pembelajaran. *Balance Scorecard* method banyak digunakan untuk membantu pengukuran kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2013).

2.10.4 Pengukuran *Value for Money*

Pengukuran yang memeriksa kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas . Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan input dan output. Efektifitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realsisasinya (Mardiasmo, 2013).

2.11. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Model Analisis & rasio pengukuran	Kesimpulan
1	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel bebas: Pendaptan Asli Daerah (PAD) Variabel terikat: Kinerja Keuangan Daerah	regresi berganda dengan pengukuran Rasio upaya fiscal	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada

					pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2	Asha Florida (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara	Variabel bebas: Pendaptan Asli Daerah (PAD) Variabel terikat: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi berganda dengan rasio kemandirian	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial hanya pajak daerah dan pajak retribusi yang berpengaruh secara dominan terhadap kinerja keuangan.
3	Novesarani (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo	Variabel bebas: Pendaptan Asli Daerah (PAD) Variabel terikat: Kinerja Keuangan Daerah	Regresi sederhana dengan pengukuran rasio kemandirian, rasio varian dan ketergantungan daerah.	Bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian daerah. PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi. PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap rasio ketergantungan daerah. Sedangkan rasio varians PAD dipengaruhi oleh jumlah PAD positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan secara umum PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4	Aksa (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah	Variabel bebas: Pendaptan Asli Daerah (PAD) Variabel terikat: Kinerja	Regresi berganda dengan pengukuran rasio kemandirian	Aceh Utara mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sehingga Aceh Utara yang dikenal dengan

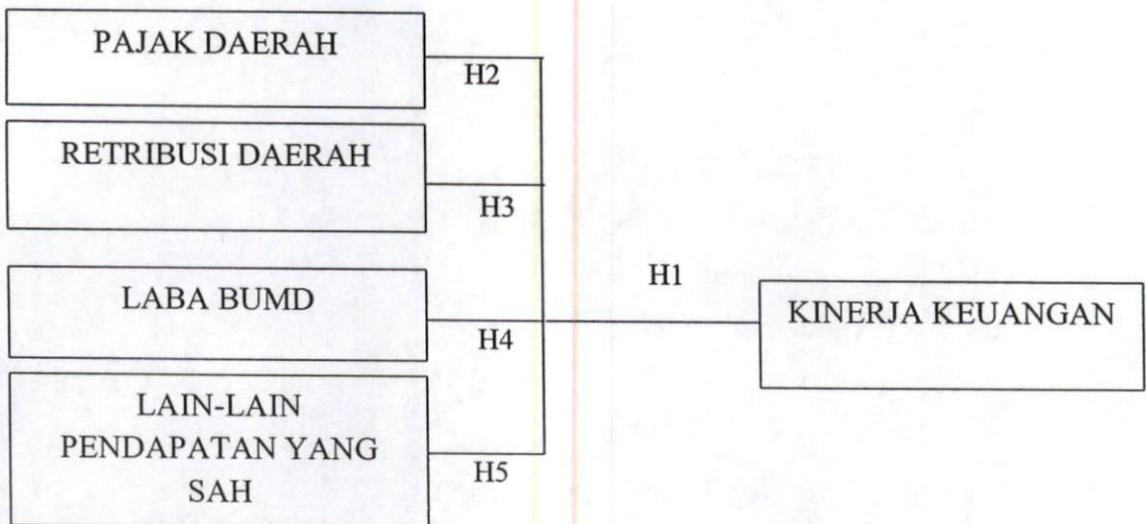
		Kabupaten Aceh Utara	Keuangan Daerah		Kabupaten paling kaya di Provinsi Aceh mampu menggenjot kenaikan pendapatan asli daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangan.
5	Zulfadli Ismed (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Se-Provinsi Sumatera Barat	Variabel bebas: kinerja keuangan berdasarkan rasio. Variabel terikat: rasio efisiensi PAD	Analisis regresi berganda rasio pertumbuhan	PAD cenderung mengalami pertumbuhan positif, walaupun tertentu mengalami penurunan, sedangkan total pendapatan konsisten mengalami kenaikan walau penerimaan PAD mengalami penurunan
6	Shapira Gustia (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi	Variabel bebas: kinerja keuangan berdasarkan rasio. Variabel terikat: rasio efisiensi PAD	Analisis Deskripsi Kuantitatif dengan menggunakan rasio kemandirian, desentralisasi, dan rasio efektifitas	Rasio kemandirian daerah dimulai tahun 2008-2010 setelah otonomi pemerintah provinsi jambi tingkat kemandirian sudah hampir stabil karena tingkat presentasi yang tinggi, rasio desentralisasi fiskal terjadi naik turun karena kenaikan PAD setelah otonomi daerah, sedangkan rasio efektifitas sudah efektif karena telah mencapai 100%
7	Anggia Melianta Cahaya (2013)	Analisis Keuatungan Efektifitas pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan daerah (studi kasus Bapeda Kabupaten Tasik Malaya	Variabel bebas: Rasio Efektivitas Keuangan Variabel terikat: Kinerja Keuangan Daerah (Bapeda Kabupaten Tasik Malaya)	Regresi Linier Rasio Efektifitas dengan rasio Efektivitas	Target PAD Kabupaten Tasik Malaya sesuai dengan yang telah ditargetkan. Hal ini dapat diketahui dari rasio efektifitas periode 2010-2012 yang mengalami kenaikan yang signifikan.

2.12. Kerangka Pemikiran

Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah).

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.13. Hipotesis

H1 = pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar.

- H2 = pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar.
- H3 = retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar.
- H4 = laba BUMN mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar.
- H5 = pendapatan lain-lai yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah pemerintah di 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Tujuh kota yang dijadikan sampel tersebut adalah : Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, dan Kota Payakumbuh.

Pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling method* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu pendapatan asli pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008-2012. Data terbatas hanya sampai dengan tahun 2012 dikarenakan Badan Pusat Statistik Sumatra Barat baru menyajikan informasi realisasi penerimaan pemerintah daerah sampai tahun 2012.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008-2012 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan seperti realisasi PAD, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain yang sah dan bukan pajak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan bantuan pemerintah pusat dan provinsi.

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran

a. Pendapatan Asli Daerah (X)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari kekayaan daerah. Sumber PAD tersebut terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain-lain yang dipisahkan. Dalam penelitian ini yang diartikan sebagai PAD adalah jumlah keseluruhan penerimaan Pemerintah Kota Sumatera Barat yang dijadikan sampel terdiri dari 7 pemerintah kota yaitu Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Seluruh penerimaan PAD kota – kota tersebut diukur berdasarkan angka yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen realisasi penerimaan Pemerintah Kota di Sumatera Barat.

1. Pajak Daerah (X_1)

Pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui masing-masing daerahnya dan berpedoman juga kepada Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini pajak yang daerah yang dijadikan penerimaan pemerintah kabupaten Kota hanya berasal dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, parkir,, pajak bahan galian, pajak air bawah tanah, BPHTB, pajak sarang burung walet, dan PBB untuk tahun 2008-2012. Jumlah Pajak

Daerah yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Kota dapat dilihat pada lampiran 2.

2. Restribusi Daerah (X_2)

Restribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini sumber pendapatan retribusi berasal dari masyarakat karena telah diberikan fasilitas jasa. Penelitian ini variabelnya diukur berdasarkan angka yang sebenarnya karena berasal dari dokumen realisasi dan penerimaan PAD tahun 2008-2012. Jumlah Restribusi Daerah yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Kota dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Laba BUMD (X_3)

Adalah penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai salah satu miliknya. Penelitian ini variabelnya diukur berdasarkan angka yang sebenarnya karena berasal dari dokumen realisasi dan penerimaan PAD tahun 2008-2012. Jumlah laba BUMD yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Kota dapat dilihat pada lampiran 2.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (X_4)

Penerimaan lain-lain yang sah yaitu penerimaan bukan pajak dan retribusi yang berasal dari hasil penjualan milik daerah, jasa giro,

sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas pembayaran daerah, setoran kelebihan kepada pihak ketiga, denda pelaksanaan pekerjaan daerah, angsuran cicilan rumah dinas.

Variabel ini diukur berdasarkan angka yang sebenarnya yang tercantum dalam dokumen realisasi penerimaan PAD tahun 2008-2012. Jumlah pendapatan lain-lain yang sah yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Kota dapat dilihat pada lampiran 2.

b. Kinerja Keuangan (Y)

Dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah Kota Padang diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Bila PAD suatu daerah rendah berarti persentase PAD untuk membiayai pembangunan itu kecil, sehingga kemandirian suatu daerah itu juga rendah begitu juga dengan sebaliknya, jika PAD tersebut tinggi maka kemandirian daerah tersebut juga tinggi. Kinerja keuangan dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam kemandirian keuangan.

Adapun rasio pengukuran yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Provinsi Kota Sumatera Barat adalah Rasio Desentralisasi Fiskal. Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan

daerah mereka. Dimana dalam rasio desentralisasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan:

$$\frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan daerah}}$$

Jumlah dari hasil perhitungan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Provinsi Kota Sumatera Barat ini dapat dilihat pada lampiran 2 dan jumlah total dari penerimaan pemerintah kota dapat dilihat pada lampiran 3.

3.6. Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan P-P Plot dan Uji Kormogorov-Smirnov. Berdasarkan P-P Plot, data dinyatakan normal apabila sebaran data berada di sekitar garis diagonal. Sedangkan berdasarkan uji Kormogorov-Smirnov, data dinyatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 (Yamin dan Kurniawan, 2011).

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah uji statistik yang digunakan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang terjadi antara variabel-variabel bebas yang ada dalam penelitian. Karena peneliti menggunakan model regresi linear berganda di dalam penelitian, maka penelitian tersebut harus terbebas dari multikolinieritas. Untuk

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas ini, peneliti melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh dari analisis statistic. Ukuran tersebut menunjukkan variabel bebas apa saja yang memiliki korelasi dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa variabel bebas yang ada dapat menjadi variabel terikat untuk variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Yamin dan Kurniawan, 2011).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji statistik yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas ini dapat dideteksi dengan caramelihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika pencaran data pada grafik *scatterplot* tidak menunjukkan suatu pola tertentu, melainkan menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas yang terjadi pada residual pengamatan (Yamin dan Kurniawan, 2011)

4. Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Menurut Yamin dan Kurniawan, (2011) Ukuaran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW).

Tabel 3.1.

Kriteria Durbin-Watson (Dw)

Dw	Kesimpulan
Kurang dari d_L	Ada autokorelasi
d_L sampai dengan d_U	Tanpa kesimpulan
d_U sampai dengan $4-d_U$	Tidak ada autokorelasi
$4-d_U$ sampai dengan $4-d_L$	Tanpa kesimpulan
Lebih dari $4-d_L$	Ada autokorelasi

Nilai d_L dan d_U dapat dilihat pada tabel statistik dengan memperhatikan jumlah sampel dan jumlah variabelnya. Sedangkan nilai Durbin-Watson dapat dilihat pada output SPSS yang dihasilkan.

2.7.2 . Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel terikat dengan satu atau beberapa variabel bebas (Yamin dan Kurniawan, 2011 : 82).

Model regresi digunakan untuk penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja (Variabel dependen)

A : Konstanta.

X1 : Pajak daerah (Variabel independen)

X2 : Retribusi daerah (Variabel independen)

X3 : Hasil perusahaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Variabel independen)

X4 : Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Variabel independen)

ε : Tingkat kesalahan pengganggu

3.7. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian arti keseluruhan regresi (Uji F)

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Begitupun sebaliknya, jika dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.

b. Pengujian Koefisien regresi parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu terhadap variabel tidak bebas dengan asumsi variabel yang lain konstan. Jika dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Begitupun sebaliknya, jika dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Selain itu, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat juga dapat dilihat berdasarkan *significant valuenya*. Jika *significant valuenya* lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Begitu pula sebaliknya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat derajat signifikansi masing-masing variabel bebas menggunakan SPSS versi 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Provinsi Sumatera Barat

4.1.1 Profil Sumatera Barat

a. Lokasi dan Keadaan Geografis

Secara geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ}54'$ Lintang Utara sampai $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan serta $98^{\circ}36'$ sampai $101^{\circ}53'$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah Sumatera Barat, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan provinsi tersebut.

b. Iklim

Menurut Schmidt dan Fergusson, type iklim Sumatera Barat terdiri dari type A, B, C, dan D. Suhu rata-rata di pantai barat berkisar antara 21°C - 38°C , pada daerah perbukitan berkisar antara 15° - 33°C , sedangkan pada daerah dataran di sebelah timur Bukit Barisan mempunyai suhu antara 19°C - 34°C . Puncak curah hujan maksimum di Sumatera Barat terjadi bulan maret Maret dan Desember dan jumlah curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juni-Juli. Jumlah curah hujan tertinggi mencapai 4.000 mm/tahun terutama di wilayah pantai barat. Sedangkan curah hujan di beberapa tempat dibagian timur relatif lebih rendah yakni antara 1.500 – 3.000 mm/tahun.

c. Topografi

Keadaan topografi wilayah Sumatera Barat bervariasi dari topografi datar, landai, curam dan mempunyai pantai sampai pergunungan. Pada umumnya bagian tengah Sumatera Barat terbentang Bukit Barisan dengan topografi relatif curam, sedangkan bagian barat dan timur posisinya relatif datar dan landai. Topografi wilayah Sumatera Barat yang relatif curam ditemui di Kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar. Topografi yang landai ditemui di Kabupaten 50 Kota dan Sawahlunto Sijunjung, sedangkan topografi yang relatif datar ditemui di Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

d. Luas wilayah

Luas wilayah provinsi Sumatera Barat sekitar 4.229.730 Ha, setara dengan 2,17 % dari luas wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia, dengan luas perairan laut diperkirakan 186.500 Km² dan panjang garis pantai 2.420.57 Km.

4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. VISI

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional Melalui Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel”

b . MISI

1. Melakukan perubahan budaya dan pola pikir birokrat agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakamuran.
2. Menciptakan sistem dan mekanisme pemerintahan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta mencegah terjadinya korupsi dalam birokrasi.
3. Membentuk sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi dan kontrol masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan.

4.2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 berikut ini menyajikan deskriptif statistik atas variabel - variabel yang terlihat dalam penelitian ini:

TABEL 4.1
ANALISIS DESCRIPTIVE

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	35	1.30E6	1.29E8	1.6866E7	3.22447E7
Retribusi	35	1.25E6	3.03E7	1.0658E7	7.90101E6
hp_kekayaaandaerah	35	1.08E6	9.00E6	3.9082E6	2.09261E6
pendapatan_lain	35	3.52E6	3.00E7	1.2486E7	6.95313E6
kinerja_karyawan	35	304714	8262606	1.12E6	1677620.940
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data sekunder yang diolah

Semua variabel memiliki nilai maksimum dan minimum positif. Data tabel tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum $1.30E6$ dan maksimum $1.29E8$ dengan rata-rata pajak daerah sebesar $1.6866E7$ serta jumlah sampel sebanyak 35 sampel.
2. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum $1.25E6$ dan maksimum $3.03E7$ dengan rata-rata retribusi daerah sebesar $1.0658E7$ serta jumlah sampel sebanyak 35 sampel.
3. Variabel hasil perusahaan dan kekayaan daerah memiliki nilai minimum $1.08E6$ dan maksimum $9.00E6$ dengan rata-rata hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar $3.9082E6$ serta jumlah sampel sebanyak 35 sampel.
4. Variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai minimum $3.52E6$ dan maksimum $3.00E7$ dengan rata-rata lain-lain PAD yang sah sebesar $1.2486E7$ serta jumlah sampel sebanyak 35 sampel.
5. Variabel kinerja memiliki nilai minimum 304714 dan maksimum 8262606 dengan rata-rata kinerja daerah sebesar $1.12E6$ serta jumlah sampel sebanyak 35 sampel.

4.3. Uji Asumsi Klasik

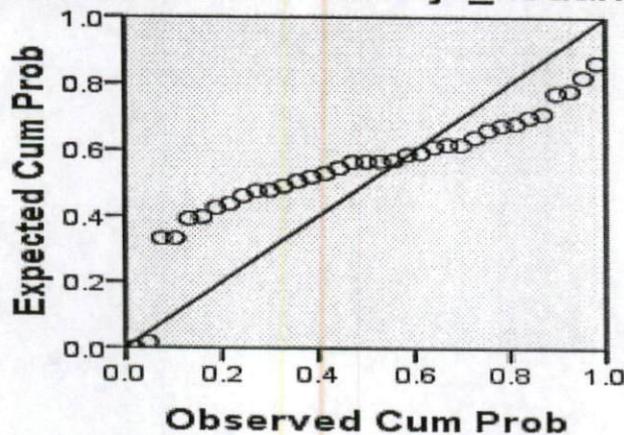
a. Uji Normalitas

Gambar 4.1

Normalitas P-P Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja_keuangan



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencaran data penelitian telah berada di sekitar garis lurus melintang, tidak ada pencaran data yang menyimpang terlalu jauh dari garis lurus melintang tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan perhitungan VIF juga memiliki nilai < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antara variabel independen.

TABEL 4.2
HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak_daerah	.323	3.094
	Retribusi	.375	2.664
	Hp_kekayaandaerah	.393	2.543
	Pendapatan_lain	.448	2.233

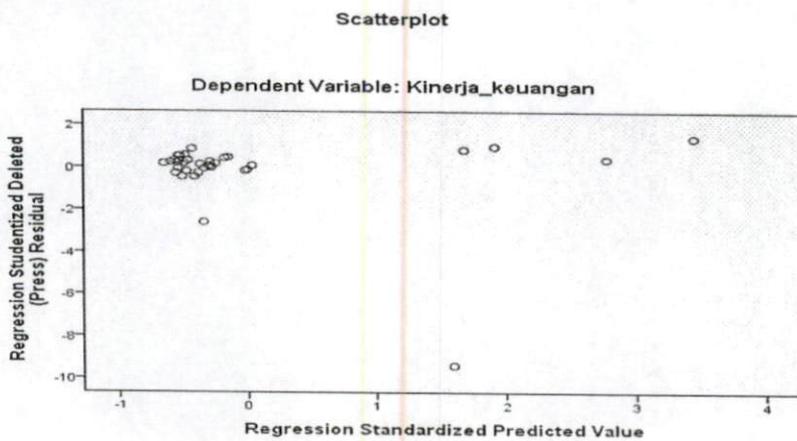
a. Dependent Variable: Kinerja_keuanga

Sumber : Data sekunder yang diolah

c. Uji heteroskedastisitas

Titik-titik pada grafik *Scatterplot* pada gambar 4.2 menunjukkan data menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, juga tidak terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 4.2
Scatterplot



d. Uji Autokorelasi

Dari hasil output dibawah menunjukkan , Durbin-Watson $d = 2,191$ dan nilai batas Durbin Watson tabel sebesar $1,726$. Nilai $1,726$ dapat dilihat dari tabel Durbin-Watson dengan $n = 35$ dan $k = 4$ dimana K adalah banyakny variabel prediktor, Karena Nilai $(4-2,191) > 1,726$ atau $1,726 < 2,191 < (4-1,726)$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi auto korelasi.

TABEL 4.3

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.688	1.69086E8	2.484

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_lain, Retribusi, Hp_kekayaandaerah, Pajak_daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah

4.4. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan matematis atau pengaruh yang timbul antara variabel bebas dengan variabel terikat di dalam suatu penelitian. Karena variabel bebas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diproyeksikan melalui empat variabel bebas, maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Melalui analisis ini dapat diketahui hasil pengujian hipotesis serta persamaan regresi yang

menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian.

a. Persamaan Regresi

TABEL 4.4
 Nilai Koefisien Regresi Untuk Kinerja Keuangan Dengan Komponen PAD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000
Pajak_daerah	8.668	1.582	.924	5.479	.000
Retribusi	-6.009	5.991	-.157	-1.003	.324
Hp_kekayaandaerah	22.209	22.098	.154	1.005	.323
Pendapatan_lain	-6.317	6.231	-.145	-1.014	.319

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4.080E8 + 8.668 X1 - 6.009 X2 + 22.209 X3 - 6.317 X4$$

Keterangan:

- Konstanta sebesar 4.080E8 menunjukkan apabila tidak ada variabel independen, maka kinerja sebesar 4.080E8;
- β_1 sebesar 8.668 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 8.668 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_2 sebesar -6.009 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar -6.009 dengan asumsi variabel lain tetap ;

- β_3 sebesar 22.209 menunjukkan bahwa setiap kenaikan hasil perusahaan dan kekayaan daerah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar 22.209 dengan asumsi variabel lain tetap ;
- β_4 sebesar - 6.317 menunjukkan bahwa setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah sebesar 1 % akan diikuti kenaikan kinerja sebesar - 6.317 dengan asumsi variabel lain tetap.

b. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun.

TABEL 4.5
Hasil Pengujian Hipotesa Uji (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.688	1.69086E8	2.484

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_lain, Retribusi, Hp_kekayaandaerah, Pajak_daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari Hasil output spss diperoleh R Square (R^2) = 0,72. Ini berarti keragaman variabel dependen (Kinerja Keuangan) 72% dijelaskan oleh keragaman variabel independen (PAD) dan 28% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model atau 68 % secara silmultan PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kota Provinsi Sumatera Barat.

4.5 Uji Hipotesis

Untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis secara keseluruhan PAD dapat menggunakan uji F, sedangkan untuk menguji komponen-komponen PAD terhadap kinerja keuangan dapat menggunakan uji T.

4.5.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

TABEL 4.6
HASIL UJI F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.254E18	4	5.636E17	19.714	.000 ^a
	Residual	8.577E17	30	2.859E16		
	Total	3.112E18	34			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_lain, Retribusi, Hp_kekayaandaerah, Pajak_daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil dari olahan data spss diatas maka dapat diketahui bahwa: **H1 diterima**, dimana Pendapatan Asli daerah (PAD) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena F hitung 19.714 dan tingkat signifikansi 0,000 karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05. Hasil uji ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu wenny(2012) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4.5.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan

TABEL 4.7
NILAI T-HITUNG UNTUK PAJAK DAERAH

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000
Pajak_daerah	8.668	1.582	.924	5.479	.000

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Berdasarkan hasil dari olahan data spss diatas maka dapat diketahui bahwa: **H2 diterima**, dimana pajak daerah memberikan koefisien parameter sebesar 8.668 dengan nilai signifikan yaitu 0.00 dimana $< 0,05$ maka **pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar**. Hasil Uji t ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Asya (2012) dimana pajak daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dan dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil menggali potensi pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah untuk membangun otonomi daerah.

4.5.3 Pengaruh Pajak Retribusi terhadap Kinerja Keuangan

TABEL 4.8
NILAI T-HITUNG UNTUK PAJAK RETRIBUSI

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000
Retribusi	-6.009	5.991	-.157	-1.003	.324

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Berdasarkan hasil dari olahan data spss diatas maka dapat diketahui bahwa: **H3 ditolak**, dimana retribusi daerah memberikan koefisien parameter sebesar -6.009 dengan nilai signifikan yaitu 0.324 dimana $> 0,05$ maka **pajak retribusi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar**. Hasil uji ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Adegustara (2009) yang mengatakan bahwa pajak retribusi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan di provinsi Sumbar karena disebabkan oleh kurangnya pemetaan terhadap potensi pajak retribusi serta kurangnya pengawasan atas pengelolaan pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh setiap SKPD.

4.5.4 Pengaruh Laba BUMD terhadap Kinerja Keuangan

TABEL 4.9
NILAI T-HITUNG UNTUK LABA BUMD

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000
Laba BUMD	22.209	22.098	.154	1.005	.323

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Berdasarkan hasil dari olahan data spss diatas maka dapat diketahui bahwa: **H4 ditolak**, dimana Laba BUMN memberikan koefisien parameter sebesar 22.209 dengan nilai signifikan yaitu 0.323 dimana $> 0,05$ maka **Laba BUMD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar**. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu dimana Agus Setyawan, Anton and Wahyono (2007) mengatakan saat ini, Banyaknya BUMD di Indonesia memiliki kinerja yang sangat buru. Mereka tidak bisa memberikan kontribusi cukup tinggi untuk anggaran goverment local, sayangnya, mereka menjadi pusat biaya lembaga bukan profit center. Kemudian lagi, BUMD memiliki sumber daya tersembunyi banyak yang belum di eksplorasi.

4.5.5 Pengaruh Pendapatan Lain-Lain yang Sah terhadap Kinerja Keuangan

TABEL 4.10

NILAI T-HITUNG UNTUK PENDAPATAN LAIN-LAIN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000
Pendapatan_lain	-6.317	6.231	-.145	-1.014	.319

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Berdasarkan hasil dari olahan data spss maka dapat ditarik kesimpulan:

H5 ditolak, dimana pendapatan lain-lain yang sah memberikan koefisien parameter sebesar -6.317 dengan nilai signifikan yaitu 0.319 dimana $> 0,05$ maka **pendapatan lain-lain yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota di Provinsi Sumbar**. Hal ini juga sama diungkapkan oleh penelitian terdahulu yaitu Asya (2012) bahwa pendapatan lain-lain yang sah tidak berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan/ keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
2. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota Provinsi Sumatera Barat. Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Asha (2012) yang mengatakan pajak daerah berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah hal ini dikarenakan pemerintah semenjak diberlakukan otonomi daerah, pemerintah sangat gigih dalam peningkatan pajak daerah.
3. Pajak retribusi daerah, tidak berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Adegustara (2009) yang mengatakan bahwa pajak retribusi tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan di provinsi Sumbar karena disebabkan oleh

pemetaan terhadap potensi pajak retribusi serta kurangnya pengawasan atas pengelolaan pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh setiap SKPD.

4. Pajak hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba BUMD), tidak berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat. Dimana penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dimana Agus Setyawan (2007) mengatakan saat ini, Banyaknya BUMD di Indonesia memiliki kinerja yang sangat buru, sehingga tidak bisa memberikan kontribusi cukup tinggi untuk anggaran goverment local, dimana menjadi pusat biaya lembaga bukan profit center. Kemudian lagi, BUMD memiliki sumber daya tersembunyi banyak yang belum di eksplorasi.
5. Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh dominan dalam pendapat kinerja keuangan daerah pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat.

5.2. Saran

a. Bagi Pemerintah Kota Provinsi Sumatra Barat

1. Diharapkan Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan dan menggali lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak hanya peningkatan pada pajak daerah saja tetapi juga kepada retribusi daerah, Laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Agar pemerintah dapat mensejahterakan rakyat dan dapat memajukan pembangunan pemerintah kota provinsi Sumatera barat menjadi lebih sukses dan lebih maju untuk kedepannya.

2. Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat mengurangi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi agar dapat mewujudkan otonomi daerah yang murni dari hasil pendapatan asli daerah .
3. Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan atas pengelolaan/pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh setiap SKPD.
4. Sebaiknya Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dalam memberikan sanksi harus konsisten dan tegas terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pemerintah Kota Provinsi Sumatera Barat harus meningkatkan sosialisasi ke pada masyarakat tentang kepatuhan dan kepedulian warga untuk membayar pajak retribusi dan pajak daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan serta menambah jumlah sampel yang akan diteliti sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar penilaian kinerja keuangan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti juga mengharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk mencoba menggunakan rasio-rasio selain rasio desentralisasi fiskal untuk mengukur penilaian kinerja keuangan di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. 2005. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis. Medan
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. 2004. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. 2013. Mohamad. Yogyakarta.
- Ruslina, Nadaek. 2003. *Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta. 2009
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Welsch, Glenn A, Ronald W. Hilton, dan Paul N. Gordon. 1995. *Budgeting (Penyusunan Anggaran Perusahaan) Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*
- Whittaker, James B. 1995. *The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement, Educational Services Institut: Arlington, Virginia*.
- Yanti. 2011. *Analisis Rasio Sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Universitas Hasanuddin .

LAMPIRAN 1

Regression Antara PAD dengan Kinerja

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	35	1.30E6	1.29E8	1.6866E7	3.22447E7
Retribusi	35	1.25E6	3.03E7	1.0658E7	7.90101E6
hp_kekayaaandaerah	35	1.08E6	9.00E6	3.9082E6	2.09261E6
pendapatan_lain	35	3.52E6	3.00E7	1.2486E7	6.95313E6
kinerja_karyawan	35	304714	8262606	1.12E6	1677620.940
Valid N (listwise)	35				

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.688	1.69086E8	2.484

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_lain, Retribusi, Hp_kekayaandaerah, Pajak_daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.254E18	4	5.636E17	19.714	.000 ^a
	Residual	8.577E17	30	2.859E16		
	Total	3.112E18	34			

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_lain, Retribusi, Hp_kekayaandaerah, Pajak_daerah

b. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Coefficients^a

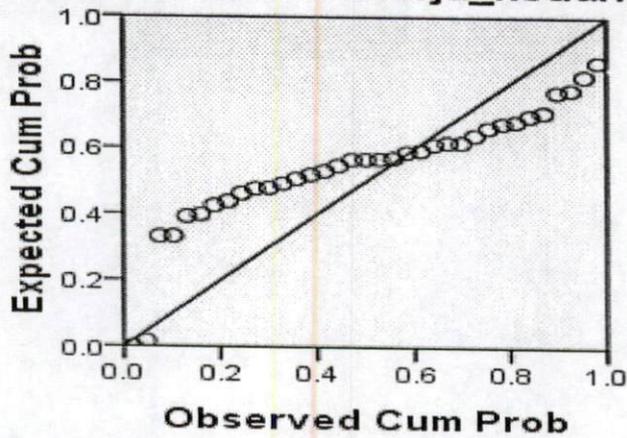
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.080E8	8.929E7		4.569	.000		
Pajak_daerah	8.668	1.582	.924	5.479	.000	.323	3.094
Retribusi	-6.009	5.991	-.157	-1.003	.324	.375	2.664
Hp_kekayaandaerah	22.209	22.098	.154	1.005	.323	.393	2.543
Pendapatan_lain	-6.317	6.231	-.145	-1.014	.319	.448	2.233

a. Dependent Variable: Kinerja_keuangan

Charts

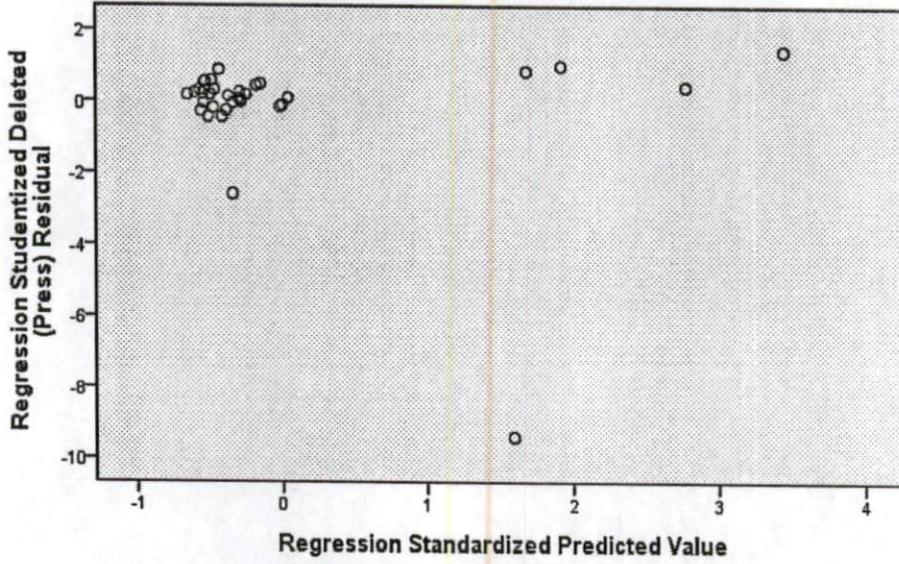
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja_keuangan



Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja_keuangan



LAMPIRAN 2.

Data PAD Dan Penerimaan Daerah Kota Sumatra Barat Data Induk Tahun 2008-2012 (Ribuan)

No	KOTA	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI	LABA BUMD	PENDAPATAN LAIN-LAIN	TOTAL PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PAD YG SAH	PEMBIAYAAN DAERAH	TOTAL PENERIMAAN	KINERJA	
1.	PADANG	2008	76.795.691	24.793.292	3.788.864	12.351.037	117.728.886	727.341.517	73.787.010	141.864.242	1.060.721.655	11,10%	
		2009	71.666.752	21.898.305	4.741.733	15.011.620	113.318.411	732.818.456	111.139.111	157.097.763	1.114.373.741	72,13%	
		2010	77.639.340	21.985.780	5.293.729	11.772.433	116.691.283	866.142.644	866.142.644	57.185.806	107.348.295	1.147.368.028	10,17%
		2011	102.412.436	23.457.002	8.996.686	22.276.033	140.878.114	828.149.464	828.149.464	258.047.963	46.923.210	1.273.998.751	11,06%
		2012	128.595.100	30.325.980	8.403.534	22.126.224	189.450.840	1.044.585.806	1.044.585.806	241.951.474	97.284.593	1.573.272.713	12,04%
2.	SAWAHLUNTO	2008	1.535.694	13.611.889	2.835.566	5.458.840	23.441.989	236.072.561	10.886.442	24.298.872	294.699.864	7,95%	
		2009	1.595.547	13.891.964	3.036.888	8.008.577	26.532.986	255.712.964	10.921.827	15.647.807	308.815.584	8,59%	
		2010	1.932.702	13.611.889	3.416.521	6.651.328	23.782.089	239.611.108	239.611.108	49.980.577	31.555.677	344.929.451	6,89%
		2011	2.320.146	3.811.223	6.633.070	23.606.635	36.371.075	273.921.926	273.921.926	79.788.002	33.160.893	423.241.896	8,59%
		2012	2.969.920	2.295.581	6.763.117	25.266.997	37.295.617	316.021.196	316.021.196	35.885.894	61.835.128	451.037.835	82,63%
3.	SOLOK	2008	1.387.050	3.059.285	2.448.070	14.752.189	21.644.596	255.912.134	10.967.383	162.676.756	451.200.869	4,80%	
		2009	1.330.478	2.633.617	3.347.637	16.519.393	23.831.125	261.317.608	19.561.609	162.721.234	467.431.576	5,10%	
		2010	1.878.901	2.958.048	3.716.430	10.020.892	18.574.273	242.829.016	242.829.016	22.158.923	137.449.615	421.011.827	4,40%
		2011	4.334.398	5.071.277	1.860.068	3.521.635	14.787.380	332.954.656	332.954.656	83.594.745	31.005.636	467.342.417	3,20%
		2012	3.911.741	4.747.471	6.230.004	8.431.289	23.320.507	324.818.851	324.818.851	39.587.945	94.460.867	482.188.170	4,84%
4.	PADANG PANJANG	2008	1.489.659	4.261.024	1.597.438	6.099.385	13.457.506	239.306.486	6.378.126	59.618.723	318.760.841	4,22%	
		2009	2.268.061	11.940.450	1.986.512	6.386.280	22.581.303	250.249.556	9.965.019	66.908.757	349.704.635	6,46%	
		2010	1.917.441	14.258.538	2.225.933	9.074.256	27.476.168	252.000.358	252.000.358	8.414.915	70.892.958	358.784.399	7,66%
		2011	3.001.439	18.345.654	3.693.672	5.419.038	30.460.803	292.080.142	292.080.142	24.222.877	53.155.812	399.919.634	7,52%
		2012	3.514.178	19.308.186	4.101.829	5.496.414	32.420.607	309.022.360	309.022.360	31.445.810	53.218.090	426.106.867	7,61%
5.	BUKITINGGI	2008	8.690.766	9.851.572	1.084.306	14.201.897	33.828.542	283.656.384	8.727.140	62.369.203	388.581.269	8,71%	
		2009	10.336.714	11.048.263	1.374.582	16.132.376	38.891.935	292.157.765	8.853.244	99.631.219	439.534.163	8,85%	
		2010	11.728.705	12.609.756	1.629.523	7.679.188	33.847.174	279.481.878	279.481.878	25.092.420	90.458.297	428.879.769	7,59%
		2011	17.454.945	14.079.648	3.038.188	7.703.435	42.286.418	305.965.314	305.965.314	53.202.325	65.622.525	467.076.582	9,05%
		2012	19.848.460	14.748.993	2.892.369	7.586.732	45.076.555	365.938.810	365.938.810	50.381.122	59.307.566	520.704.053	8,66%
6.	PAYAKUMBUH	2008	2.005.634	17.032.684	3.497.296	8.955.391	31.491.006	277.844.363	8.987.399	63.103.884	381.426.652	8,26%	
		2009	2.912.433	6.456.756	3.973.757	19.212.435	32.555.381	290.787.246	14.317.619	74.109.281	411.769.527	7,91%	
		2010	3.302.924	7.435.333	4.368.049	21.534.449	36.640.757	277.361.235	277.361.235	15.134.231	74.109.280	403.245.503	9,09%
		2011	4.569.620	8.393.531	7.823.840	23.774.143	44.561.136	297.850.281	297.850.281	58.811.441	27.711.447	428.934.305	10,39%
		2012	5.720.646	7.596.006	7.407.462	29.984.798	50.708.914	370.491.322	370.491.322	54.900.864	37.026.028	513.127.128	9,88%
7.	PARIAMAN	2008	1.650.855	1.276.232	1.785.518	8.629.177	13.341.784	279.436.567	10.606.116	52.297.015	355.681.482	3,75%	
		2009	1.298.100	1.433.899	2.139.082	7.392.101	12.265.181	288.397.912	14.313.163	89.475.269	402.449.525	3,05%	
		2010	2.582.243	1.794.586	2.398.657	8.009.052	14.884.538	277.186.844	277.186.844	54.622.333	115.943.569	462.637.284	3,22%
		2011	2.485.403	1.753.263	4.000.077	8.809.557	17.048.302	306.381.801	306.381.801	79.812.397	119.581.454	522.823.954	3,26%
		2012	3.103.626	1.254.631	4.058.646	9.161.528	17.578.732	351.373.849	351.373.849	47.190.467	120.240.263	536.383.311	3,28%